

Peran Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Sebagai Pemediasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Irmayanti Sudirman

Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare

irmayantisudirman06@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the influence of budget participation, clarity of budget targets, commitment as a mediator on the performance of government officials. This research method uses primary data, namely the results of questionnaires from all respondents with a sample size of 145 respondents from 57 SKPD in South Sulawesi. This research used a Structural Equation Modeling analysis tool based on Partial Least Square or SEM PLS version 23. The results of this research show that budget participation influences the performance of government officials. Clarity of budget targets influences the performance of government officials. Commitment is able to mediate budget participation on the performance of government officials. Furthermore, commitment is able to mediate clarity of budget targets on the performance of government officials.

Keywords: Budget Participation, Clarity of Budget Targets, Commitment, Performance of Government Apparatus

A. PENDAHULUAN

Kinerja aparatur pemerintah memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja mereka secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kinerja yang baik akan menghasilkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien. Sebaliknya, kinerja yang buruk dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan pelayanan publik yang tidak optimal. Aparatur pemerintah saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja yang tinggi dan adaptif.

Penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam kinerja aparatur pemerintah, serta untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran. Penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan mengetahui kinerja

aparatur pemerintah, masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selanjutnya penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah dapat mendukung upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi dan untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya.

Kinerja aparatur pemerintah tidak bisa dipisahkan dari anggaran, karena anggaran yang telah disiapkan memiliki dua peran utama yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan, dan kedua yaitu sebagai kriteria untuk menilai kinerja. Dengan kata lain, anggaran berperan sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk mengukur kinerja manajerial. Selain itu, (Suryani, 2021); juga menekankan bahwa untuk mencapai kinerja yang efektif yaitu dengan tercapainya tujuan anggaran dan partisipasi bawahan memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Anggaran dalam konteks sektor publik adalah suatu instrumen kebijakan yang memiliki banyak peran, dan digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah Apriani *et al.*,(2016); Arifuddin & Kusumawati (2017); Amir *et al.*, (2021). Ini berfungsi sebagai alat perencanaan kegiatan pemerintah dan layanan publik yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang. Selain itu, juga berperan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Keseluruhan rencana operasional instansi, termasuk tujuan dan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang, tercermin dalam anggaran.

Konsep penganggaran berbasis kinerja mengharuskan terjalinnya hubungan yang erat antara anggaran dan hasil kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja adalah suatu metode penganggaran yang mempertimbangkan hubungan antara alokasi dana (input) dengan hasil yang diinginkan (output) dan dampak yang diharapkan (outcomes), De Romario *et al.*, (2019); Djalil *et al.*, (2017); Bhakti *et al.*, (2015); Chohan *et al.*, (2018). Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah berkinerja baik dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan berbagai kegiatan. Prinsip dasar penganggaran berbasis kinerja mencakup penyusunan program dan penilaian kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan dan target program. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas negaranya dapat diukur melalui sejauh mana mereka mengalokasikan anggaran daerah ke unit kerja yang relevan.

Pengelolaan anggaran di sektor publik memiliki dampak yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Brownell, 1986). Apabila pengelolaan anggaran dilakukan dengan efektif, maka organisasi pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Pagalung, (2018); Amir *et al.*,(2021) menunjukkan bahwa kurangnya pengelolaan anggaran akan memiliki dampak yang luas pada pembangunan daerah, termasuk peningkatan angka kemiskinan dan kondisi sumber daya manusia

yang buruk. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja manajerial, terdapat permasalahan yang masih ada dalam pelaksanaan fungsi manajemen di SKPD Provinsi, khususnya terkait dengan peran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Sudirman et al., 2021).

Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap kinerja aparatur pemerintah. Adapun masalah yang timbul yaitu partisipasi yang rendah dari berbagai tingkatan aparatur pemerintah dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan dan pemahaman tentang anggaran. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tanggung jawab dan motivasi dalam mencapai tujuan anggaran, Bawono (2015); Adeyeye (2020); Andina (2013).

Ketidak jelasan sasaran anggaran yang kurang dapat mengarah pada penggunaan dana yang tidak efektif. Aparatur pemerintah mungkin kesulitan menetapkan prioritas dan fokus dalam pencapaian tujuan jika sasaran anggaran tidak jelas. Selanjutnya jika komitmen para aparatur pemerintah terhadap sasaran anggaran rendah, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Rendahnya komitmen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya insentif, penghargaan, atau motivasi. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara tingkat partisipasi dalam proses perencanaan anggaran dan tingkat komitmen untuk mencapai sasaran anggaran. Meskipun partisipasi tinggi, namun jika komitmen rendah, hasil yang diharapkan mungkin tidak tercapai. Terkadang, sasaran anggaran dan tingkat partisipasi mungkin tidak sejalan.

Hal ini dapat mengakibatkan konflik dan kesulitan dalam mengelola anggaran, serta mungkin memperlambat pencapaian tujuan. Partisipasi, kejelasan sasaran, dan komitmen yang rendah dapat menghambat inovasi dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena kurangnya dorongan untuk mencapai hasil yang optimal, Tahar & Sofyani (2020); Rohmawati & Adi (2016); Tambunan (2021).

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu dirancang sistem yang mempromosikan partisipasi yang lebih besar, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen yang tinggi dari para aparatur pemerintah. Mekanisme insentif, pelatihan, dan pemantauan yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan anggaran Nasution, (2021); Poon et al., (2001); Rahmiwati & Ariany (2023); Kalsum & Wahyuningsih (2015); Milani (1975). Penelitian empiris mengenai kontribusi partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, seperti Ernis *et al.*, (2017); Ganta, (2014); Giusti *et al.*, (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah.

Keterlibatan dalam proses anggaran memiliki dampak positif terhadap performa pemerintah daerah, sebuah temuan yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya pada konteks pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Hartanto *et al.*, (2018); Huang *et al.*, (2021); Rivito & Mulyani, (2019); Riyadh *et al.*, (2023). Namun, pendekatan yang berbeda diambil oleh Huang, Cheng, Wang, dan Wang (2021), yang melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan di industri Bursa Efek Taiwan. Mereka mengirimkan sebanyak 630 kuesioner dan mendapatkan 187 tanggapan, tetapi hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses penganggaran tidak memiliki dampak langsung terhadap performa aparatur pemerintah. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Derfuss, (2015). De Romario *et al.*, (2019); Effendi, (2017) yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi dan performa aparatur pemerintah.

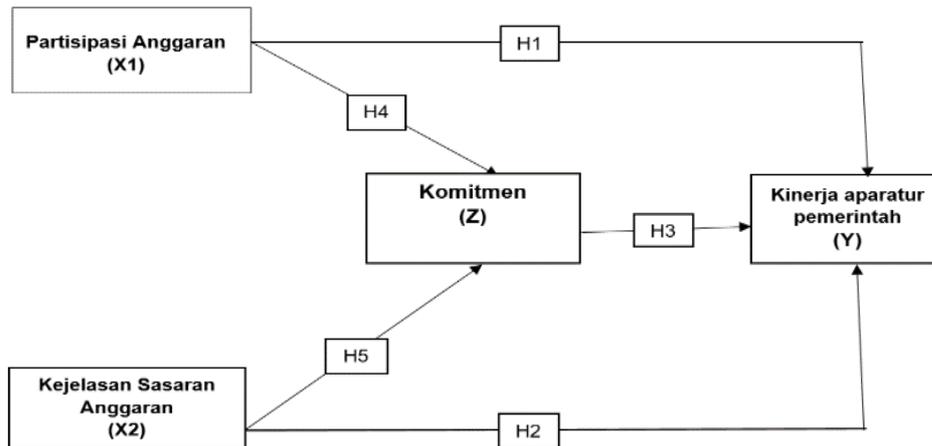
Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, menjadi alasan pentingnya mempertimbangkan variabel mediasi. Komitmen dapat digunakan sebagai variabel mediasi karena dengan adanya komitmen yang kuat terhadap pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan motivasi aparatur pemerintah. Ketika seseorang merasa komitmen terhadap tugas-tugas mereka, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan tekun dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi yang tinggi ini secara langsung berdampak pada kinerja yang lebih baik (Djalil, *et al.*, 2017); Fitriasuri & Dini, (2023).

B. LANDASAN TEORY

1. Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan di mana para manajer dan aparatur pemerintahan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi atau masyarakat, bukan tujuan pribadi mereka. Di ranah pemerintahan, teori ini menyiratkan bahwa para pegawai pemerintah bertindak demi kebaikan bersama, bukan demi kepentingan sendiri. Dalam kerangka ini, pemerintah dianggap sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab kepada rakyat, yang memberi wewenang dan dianggap sebagai pemilik sumber daya tersebut. Adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat didasari oleh kepercayaan dan kesepakatan bersama untuk mencapai visi organisasi. Di sektor publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membeberkan informasi dengan transparan kepada masyarakat, mengenai semua kegiatan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

2. Kerangka Pikir



C. METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu di seluruh SKPD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas yang mempunyai alokasi anggaran yang besar seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan SKPD bagian perencanaan dan penyusunan laporan keuangan, seperti Bappeda dan BPKAD. Sehingga jumlah sampel yaitu 145 orang terdiri dari 57 SKPD. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data yaitu data primer yaitu hasil koesioner yang diperoleh dari responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Selanjutnya analisis statistik menggunakan program SEM PLS atau Smart equation model Partial Least Square (Ghozali., 2015). Uji analisis yaitu Uji validitas dan uji realibilitas, Uji outer model dan inner model.

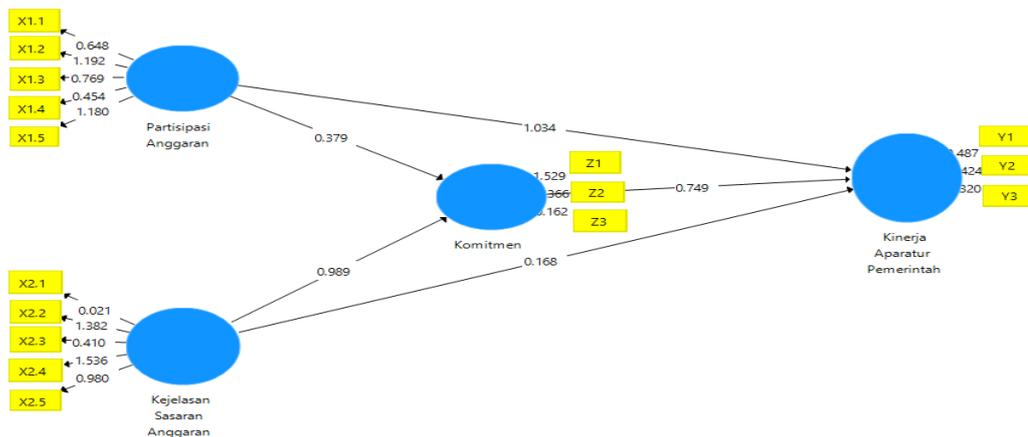
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan SEM PLS. Penelitian ini menganalisis partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen terhadap kinerja aparatur pemerintah di Sulawesi Selatan. Hasil pengujian SEM PLS menunjukkan bahwa konvergensi yang valid untuk semua indikator yang ditunjukkan dengan nilai $(y) > 0,5$. Berdasarkan hasil koesioner yang diperoleh dari jawaban responden, kemudian dilakukan uji validitas dengan hasil nilai AVE

(Average Variance Extracted) setiap variable harus lebih > 0,5 maka dikatakan valid. Selanjutnya dilakukan uji validitas pengukuran model juga dilakukan untuk mrnguji realibilitas konstruk. Uji realibilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha dan composite realibility. Syarat nilai realibilitas konstruk adalah Cronbach’s alpha dan nilai composite realibility harus lebih > 0,7. Hasil pengujian validitas dan realibilitas dapat dilihat pada table 1 yang menunjukkan bahwa semua variable valid karena nilai AVE (Average Variance Extracted) diatas 0,5 dan semua hasil variable reliabel karena nilai Cronbach’s alpha dan nilai composite realibility hasil menunjukkan > 0,7.

Tabel 1: Validitas Dan Realibilitas Model Pengukuran

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Composite Realibility
Partisipasi Anggaran	0.987	0.974
Kejelasan sasaran anggaran	0.998	0.899
Komitmen	0.973	0.986
Kinerja aparatur pemerintah	0.995	0.997



1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis pengujian menggunakan SEM-PLS melalui uji inner model. Dalam Hal ini, Uji statistik dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikan koefisien jalur antarvariabel laten yang berpengaruh.

Tabel 2: Direct effect

Variabel	T Statistik	P value	Hasil
Partisipasi Anggaran → Kinerja aparatur pemerintah	1.957	0.002	Diterima
Kejelasan Sasaran Anggaran → Kinerja aparatur pemerintah	1.985	0.000	Diterima
Komitmen → Kinerja aparatur pemerintah	2.894	0.001	Diterima

Pengujian hipotesis pada figure 2 menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan nilai sig. P-Value $0,002 < 0,05$ Maka H1 diterima. Partisipasi anggaran dapat meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran. Aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses ini cenderung lebih akuntabel terhadap masyarakat karena mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan anggaran mereka kepada pemangku kepentingan.

Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan nilai sig. P-Value $0,000 < 0,05$ Maka H2 di terima. Hasilnya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan untuk lebih mudah mengukur kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Ketika sasaran-sasaran ini terukur dan terdokumentasi dengan baik, masyarakat dan pemerintah dapat lebih mudah menilai apakah program-program atau proyek-proyek yang didanai oleh anggaran tersebut berhasil atau tidak. Ini meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dengan nilai sig. P-Value $0,001 < 0,05$ Maka H3 di terima. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Komitmen yang tinggi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa aparatur pemerintah berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan publik, maka mereka akan lebih cenderung untuk mendukung pemerintah dan mematuhi aturan dan regulasi yang ada.

Tabel 3 : Indirect effect

Variabel	T Statistik	P value	Hasil
Komitmen → Partisipasi Anggaran → Kinerja aparatur pemerintah	1.845	0.000	Diterima
Komitmen → Kejelasan sasaran Anggaran → Kinerja aparatur pemerintah	2.098	0.001	Diterima

Pengujian hipotesis pada figure 3 menunjukkan bahwa komitmen mampu memediasi partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasilnya signifikan dengan nilai sig. P-Value $0.000 > 0,05$ Maka H4 diterima. Selanjutnya komitmen mampu memediasi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasilnya signifikan dengan nilai sig. P-Value $0.001 < 0,05$ Maka H5 diterima.

2. Pembahasan

Partisipasi anggaran berarti melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran, terutama di pemerintahan. Dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran, aparatur pemerintah akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prioritas, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, serta bagaimana cara mencapainya. Aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap program atau proyek yang dianggarkan. Hal ini meningkatkan komitmen mereka untuk berhasil melaksanakannya. Dengan demikian, partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah, Wardhany (2023); Riyadh et al., (2023); Suryani & Pujiono (2020).

Partisipasi yang luas dapat membantu pemerintah menentukan alokasi sumber daya yang lebih tepat, mengingat mereka yang terlibat sering memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan dan tantangan di lapangan. Partisipasi dalam proses anggaran meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi karena banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam pengawasan. Aparatur yang merasa pendapat dan masukannya dihargai dalam proses penyusunan anggaran cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, potensi kesalahan dalam penyusunan anggaran bisa diminimalkan. Selain itu, konflik yang mungkin timbul karena ketidakpuasan terhadap alokasi anggaran bisa diredam karena setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini menggunakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi.

Kejelasan sasaran anggaran adalah faktor yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik dan kinerja aparatur pemerintah. Sasaran anggaran yang jelas membantu mengarahkan aparatur pemerintah dan organisasi pemerintah pada tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran tidak hanya penting untuk pengelolaan anggaran yang efisien tetapi juga berpengaruh positif pada kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Widanaputra & Mimba (2014); Sholihin et al., (2011); Rivito & Mulyani (2019).

Sasaran anggaran yang jelas membuat aparatur pemerintah lebih mudah dipantau dan dievaluasi oleh pihak eksternal, seperti badan pengawas, masyarakat, dan lembaga legislatif. Dengan demikian, mereka merasa lebih bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang diharapkan. Kejelasan sasaran anggaran juga penting dalam membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat memiliki hak untuk tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan, dan sasaran yang jelas memungkinkan mereka untuk melihat apakah anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Maka dengan sasaran anggaran yang jelas dapat membantu mengarahkan aparatur pemerintah dan organisasi pemerintah mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur.

Komitmen yang kuat terhadap pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan motivasi aparatur

pemerintah. Ketika seseorang merasa komitmen terhadap tugas-tugas mereka, mereka lebih cenderung untuk bekerja dengan tekun dan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi yang tinggi ini secara langsung berdampak pada kinerja yang lebih baik. Individu yang komitmen terhadap organisasi atau pemerintah akan lebih cenderung untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan setia dan patuh terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini dapat mengurangi potensi pelanggaran etika atau perilaku yang tidak patuh, yang dapat menghambat kinerja. Orang-orang yang merasa komitmen terhadap pekerjaan mereka cenderung lebih produktif. Mereka mungkin lebih fokus pada tugas-tugas mereka dan bekerja dengan efisien, yang menghasilkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memelihara komitmen karyawan. Wulandari, (2013) ; Qorni & Rizana (2021) ; Siwi, et al., (2018); Sembiring, et al., (2020).

Penelitian ini menggunakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Maka aparatur pemerintah yang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik biasanya lebih peduli terhadap kebutuhan warga negara dan lebih berorientasi pada memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan warga negara dan memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan demikian, komitmen yang kuat terhadap pekerjaan, organisasi, dan tujuan pemerintah dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah dan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

Komitmen mampu memediiasi partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Jika aparatur pemerintah memiliki komitmen yang kuat, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses penganggaran. Partisipasi aktif dalam penganggaran memungkinkan aparatur untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prioritas dan alokasi sumber daya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja mereka. Dengan partisipasi anggaran yang lebih baik, aparatur pemerintah dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang keduanya penting untuk kinerja pemerintah yang baik. Penelitian ini didukung oleh Suryani & Pujiono (2020); Riyadh et al., (2023).

Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Maka komitmen yang tinggi dari aparatur pemerintah dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras, meningkatkan kualitas pelayanan, dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja mereka yaitu salah satunya dengan partisipasi anggaran.

Komitmen mampu memediasi kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran dapat memberikan arah yang jelas kepada aparatur pemerintah tentang apa yang harus dicapai. Namun, komitmen individu atau kelompok terhadap mencapai sasaran tersebut sangat penting. Komitmen ini dapat membantu mendorong mereka untuk berfokus dan berusaha lebih keras dalam mencapai sasaran tersebut. Ketika individu merasa komitmen pribadi terhadap pencapaian sasaran anggaran, mereka lebih cenderung merasa bertanggung jawab atas pencapaian atau ketidakberhasilannya. Komitmen ini dapat menjadi penghubung antara kesadaran tentang sasaran anggaran dan tindakan nyata untuk mencapainya. Penelitian ini sejalan dengan Rivito & Mulyani (2019); Sholihin et al., (2011). Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi di mana para aparatur tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi demi kepentingan publik. Pemerintah bertindak sebagai steward, pengelola sumber daya, sedangkan rakyat sebagai principal, pemilik sumber daya. Kepercayaan dan tujuan bersama menjadi landasan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akuntabilitas menjadi esensi dalam teori ini. Pemerintah sebagai steward wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada rakyat sebagai principal. Hal ini meliputi pengungkapan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Maka komitmen yang kuat terhadap sasaran anggaran dapat meningkatkan kualitas kinerja, karena individu atau kelompok yang berkomitmen cenderung berusaha lebih keras untuk mencapai sasaran tersebut. Mereka mungkin berusaha untuk mencapai sasaran dengan lebih baik, efisien, dan efektif.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja

aparatur pemerintah, serta komitmen dapat memeditasi partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sehingga penelitian ini membantu pemerintah untuk lebih meningkatkan control terkait dengan kinerja dari aparatur dipemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah terkait partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen, yaitu sebagai berikut :

- 1) Analisis Partisipasi Anggaran ;
 - Teliti tingkat partisipasi anggaran di berbagai tingkat organisasi pemerintah. Fokus pada sejauh mana stakeholder terlibat dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran.
 - Bandingkan tingkat partisipasi di antara berbagai departemen atau unit organisasi. Apakah partisipasi lebih tinggi di tingkat tertentu?
- 2) Evaluasi Kejelasan Sasaran Anggaran ;
 - Tinjau kejelasan sasaran anggaran di dokumen perencanaan dan alokasi anggaran. Bagaimana sasaran-sasaran tersebut diartikulasikan dan diukur?
 - Tentukan sejauh mana kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan oleh pegawai pemerintah.
- 3) Pengukuran Komitmen Terhadap Kinerja ;
 - Kaji tingkat komitmen para pegawai pemerintah terhadap pencapaian sasaran anggaran dan kinerja organisasional.
 - Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat komitmen, seperti insentif, pengakuan, atau faktor motivasional lainnya.
- 4) Survei dan Wawancara ;
 - Gunakan metode survei dan wawancara untuk mengumpulkan, pandangan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pegawai, dan masyarakat umum,
 - Fokus pada persepsi mereka tentang efektivitas partisipasi anggaran, kejelasan sasaran, dan dampaknya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
- 5) Analisis Pengaruh Faktor Eksternal ;
 - Pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi partisipasi anggaran

dan kinerja, seperti kondisi ekonomi, kebijakan nasional, atau tekanan masyarakat.

- Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, pertimbangkan untuk menggali literatur terkini dan kerangka kerja konseptual yang relevan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A., Rasuli, M., & Taufik, T. (2016). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 161-175.
- Arifuddin, F. A., & Kusumawati, A. (2017). Participation and Goal Clarity Budget to Performance Apparatus with Commitment and Cultural Organization as a Moderating Variable. *World*, 7(2).
- Arifin, A., dan Pagalung, G. (2018). Empirical study of the effect of participation of budget in managerial performance. *International Journal of Advanced Engineering, Management and Science*, 4(9), 264322.
- Amir, A., Ridwan, R., Din, M., Yamin, N., Zahra, F., & Firman, M. (2021). The role of budget participation in improving managerial performance. *Accounting*, 7(2), 269-280.
- Adeyeye, G. B. (2020). Budget participation and employees performance in selected firms in the private sector in nigeria. *Nigerian Journal of Risk and Insurance*, 10(1), 1-32.
- Andina, R. P. (2013). Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kompensasi , job relevan informasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, Artikel Ilmiah Mahasiswa, pp. 1–5.
- Bawono, A. D. B. (2015). *The Role of Performance Based Budgeting in the Indonesian Public Sector*, Department of Accounting and Corporate Governance, Macquarie University, Australia.
- Bhakti, D. C., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 29-43.
- Chohan, U. W. (2018). Budget reform and political reform, *Global Encyclopedia Of Public Administration*, stewardship theory, pp.1–6. Chohan, U. W. dan Jacobs, K. (2017). Public value in politics: A legislative budget office approach, *International Journal of Public Administration*, 40(12), pp. 1063–1073.
- De Romario, F., Dwija, Igama., Badera, IDN., dan Putra, Inwa. (2019). Effect of budget participation towards regional government managerial performance, *International research journal of management, IT and social sciences*, 6(3), 101-107.
- Djalil, M. A., Indriani, M., dan Muttaqin, M. (2017). The Influence of Organizational Commitment and Motivation in the Relationship between Budget Participation and Managerial Performance (Empirical study on Provincial Government Agencies (SKPA) of Aceh

- Province, Indonesia), BRAND. *Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution*, 8(1), 12-24.
- Effendi, R. (2017). Influence on local government performance: Budget participatory, budget control and organizational structure working procedures of dysfunctional behavior. *European Research Studies Journal* Volume XX, Issue 3A, 2017 pp. 580-593.
- Ernis, F., Sularso, R. A. dan Wardayati, S. M. (2017). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan budaya organisasi, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(2), pp. 139–154.
- Fitriasuri, F., & Dini, S. R. P. (2023). The Influence of Budget Participation, Clarity of Budget Targets on Managerial Performance. *Quantitative Economics and Management Studies*, 4(1), 162-167.
- Frederica, D., & Augustine, Y. (2020). The effect of budget participation, budget planning and clarity of budget goals on performance with environmental uncertainty as moderating variables.
- Ganta, V. C. (2014). Clarity of budget goals in the workplace to improve the employee performance. *International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences*, 2(6), 221-230.
- Ghozali, I. (2015) *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Giusti, G., Kustono, A. S., dan Effendi, R. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan budaya organisasi dan motivasi sebagai variabel intervening. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 121-128
- Hamid, H., Nadirsyah, H. P., & Djalil, M. A. (2020). Effect of Budget Participation, Clarity of Budget Objectives, Budgetary Feedback, Budget Evaluation, and Difficulty of Budget Objectives on Performance of Government Agency Units (Study on Banda Aceh City Government, Aceh, Indonesia). *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management. Aceh*.
- Hartono, J. dan Abdillah., W. (2015) *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris*. BPFE Yogyakarta.
- Huang, M. J., Cheng, K. C., Chung, S. H., Wang, H. M., dan Wang, K. H. (2021). Budget participation capacity configuration (bpcc), budgeting participation requirement and product innovation performance. *Sustainability*, 13(10), 5614.
- Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 58-76.
- Kalsum, A., & Wahyuningsih, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 26(1), 83-94.
- Milani (1975). The relationship of participation in budget - setting to industrial supervisor performance and attitudes: A field study. *The Accounting Review*. Tahar, A., & Sofyani, H. (2020). Budgetary participation, compensation, and performance of local working unit: The intervening role of organizational commitment. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1),

145-161.

- Nasution, M. F. (2021). The Effect of Clarity on Budget Targets and Accounting Controls on Managerial Performance in Panin Sekuritas. *Journal of Management Science (JMAS)*, 4(3), 93-97.
- Poon, M., Pike, R., & Tjosvold, D. (2001). Budget participation, goal interdependence and controversy: A study of a Chinese public utility. *Management Accounting Research*, 12(1), 101-118.
- Qorni, F., & Rizana, D. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Dan Internal Locus Of Control Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 9(2), 32-41.
- Rahmiwati, R., & Ariany, R. (2023). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 442-457.
- Rivito, A., & Mulyani, S. (2019). The Effect of Budget Participation on Local Government Performance with Organizational Commitment as Moderating Variable. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 90-103.
- Riyadh, H. A., Nugraheni, F. R., & Ahmed, M. G. (2023). Impact of budget participation and leadership style on managerial performance with organizational commitment as intervening variable. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2175440.
- Rohmawati, I., & Adi, S. W. (2016). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sembiring, L. D., Sudirman, A., & Silitonga, H. P. (2020). Dampak kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pematangsiantar. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 436-445.
- Sholihin, M., Pike, R., Mangena, M., & Li, J. (2011). Goal-setting participation and goal commitment: Examining the mediating roles of procedural fairness and interpersonal trust in a UK financial services organisation. *The British accounting review*, 43(2), 135-146.
- Siwi, N. D. P., Kustono, A. S., & Puspitasari, N. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran dengan komitmen, budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten bondowoso. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 119-130.
- Sudirman, I., Frihatni, A. A., Mandacan, F., & Sundari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajer Perhotelan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Parepare Sulawesi Selatan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3).
- Suryani, F., & Pujiono, P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(1), 167-181.
- Tahar, A., & Sofyani, H. (2020). Budgetary participation, compensation, and performance of local

working unit: The intervening role of organizational commitment. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 145-161.

- Tambunan, B. H. (2021). The Effect Of Budget Participation, Budget Target Clarity and Authority Transfer on Managerial Performance. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(1), 17-23.
- Wardhany, M. (2023, May). The Participation and Budget Clarity Effect on Government Agencies Accountability Performance with Culture and Work Commitment as Moderating Variables. In *7th International Conference on Accounting, Management and Economics (ICAME-7 2022)* (pp. 603-615). Atlantis Press.
- Widanaputra, A. A., & Mimba, N. P. S. H. (2014). The influence of participative budgeting on budgetary slack in composing local governments' budget in Bali province. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 391-396.
- Wulandari, N. (2013). pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).